

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pendirian perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja serta untuk mengetahui dan menganalisis urgensi akta pendirian perseroan dalam perspektif undang-undang cipta kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkait permasalahan yang dibahas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Pendirian PT yang bisa dilakukan tanpa adanya akta notaris dalam omnibus law dengan kriteria tertentu, hal tersebut bisa dilaksanakan sepanjang pendirian PT bersifat deklaratif dan modal kecil. Pendirian PT tanpa akta notaris membuat keabsahan dokumen, keabsahan identitas dan keabsahan dari kehendak menjadi tidak terjamin dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melepaskan peran notaris berarti berisiko dalam keakuratan data dan dampak besar ke proses lain.

Kata Kunci : *Pendirian Perseroan, UMKM, Omnibus Law*